

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Faktanya pemilik Bangunan Cagar Budaya Tjan Bian Thiong boleh menggunakan Bangunan Cagar Budaya tersebut untuk dijadikan sebagai hotel. Pemilik Bangunan Cagar Budaya dapat memanfaatkan bangunan tersebut sebagai hotel dengan metode pengembangan dengan cara adaptasi, untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini, bukan dengan merobohkan Bangunan Cagar Budaya yang sudah ada sebelumnya untuk membangun hotel.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilik bangunan seharusnya berkonsultasi kepada pihak terkait seperti Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan/atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum mendirikan sebuah hotel dengan merobohkan bangunan terlebih Bangunan Cagar Budaya.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta seharusnya melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta sebelum memberikan rekomendasi, dan dalam memberikan rekomendasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 83 mengenai adaptasi dan juga tetap memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Pasal 15 ayat (2), mengenai perlakuan sama dengan Cagar Budaya apabila Warisan Budaya telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah.

3. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yang berkaitan dengan Cagar Budaya seharusnya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sebelum menerbitkan izin dan izin harus sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seyogyanya tetap menghormati Peraturan Daerah sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dibuat untuk melindungi Warisan Budaya yang terdapat dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R Salian, Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ardian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Sulistiyono, 2011, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Budi Utomo, 2013, *Hukum Perdata*, Sejahtera, Yogyakarta.
- Boedi Harsono SH, 1974, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djembatan, Jakarta.
- Djoko Muljono, 2009, *Tax Planing Menyiasati Pajak Dengan Bijak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1997, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Hendayat Sutopo dan Westy Soemanto, 1993, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Herman Hernit, 2009, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah: Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama (Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia)*, CV. Mudar Maju, Bandung.
- I. Gde Widja, 1982, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
- Imam Soetikinjo, 1983, *Politik Agraria Nasional*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

J. Andy Hartanto, 2012, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang, Yogyakarta.

Jhonny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Pranada Media, Jakarta.

M.Zain, 2006, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta.

Richard Sihite, 2014, *Hotel Management (Pengelolaan Hotel)*, Jakarta, Penerbit SIC.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

R Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata; Hukum Benda*, 2000, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi Agus Wijayanti, 2001, *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*, Terawang, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjondronegoro, MP. Soediono dan Gunawan Wiradi, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Gramedia, Jakarta.

Uka Tjandrasasmita, 2009, *Arkeologi Islam Nusantara*, Kepuetakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah: Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 (Edisi Revisi)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*, Garasindo, Yogyakarta.

Jurnal

Kendall, D.G, 1984, *Bulletin Of The Mathematical Society Shape manifolds Procrustean Metrics and Camplex Projective Space* 16, hlm. 81-121 <http://plms.oxfordjournals.org/content/16/2/81.abstrac>, diakses 13 September 2016.

Sari Aritha Panggabean, 2014, *Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Kota Semarang Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010*, NUNNES LAW JOURNAL, ULJ 3 (2) 2014, Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 70. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Banguna Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.

Internet

Damang, 2011, *Hak Guna Bangunan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-guna-bangunan.html>, diakses 7 Mei 2017.

*Elanto Wijoyono,*2015, Usut Tuntas Kasus Penghancuran Bangunan Warisan Budaya Tjan Bian Thiong untuk Hotel Amaris Malioboro akibat Mal-Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta. <https://www.change.org/p/gubernur-diy-kepala-bpcb-yogya-usuttuntas-kasus-penghancuran-bangunan-warisan-budaya-tjan-bian-thiong-untuk-hotel-amaris-malioboro>, diakses 3 Agustus 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://kbbi.web.id/bangun>, diakses 14 September 2016.

Ahadi, 2012, *Apa Arti Membangun Yang Sebenarnya*, <http://www.ilmusipil.com/apa-arti-membangun-yang-sebenarnya>, diakses 14 September 2016.

<http://www.businessdictionary.com/definition/hotel.html>, diakses 14 September 2016.

Cambridge

Dictionary,

<http://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hotel>, diakses 14
September 2016.





Lampiran Gambar 1: Bangunan Tjan Bian Thiong sebelum Tahun 2013



Lampiran Gambar 2: Bangunan Tjan Bian Thiong yang sudah rata dengan tanah.



Lampiran Gambar 3: Hotel Amaris Malioboro yang dibangun di atas lahan bekas Bangunan Warisan Budaya Tjan Bian Thiong